

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 16/PUU-XVIII/2020 TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI JABATAN NOTARIS**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister
Kenotariatan Di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas*



Oleh:

Silvyia Pramunesa Bondes
1920123013

Dosen Pembimbing:
Prof. Dr. Zainul Daulay, SH., MH
Dr. Yossierwan, SH.,LLM

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2022**

**IMPLIKASI PUTUSAN MAKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 16/PUU-XVIII/2020 TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI JABATAN NOTARIS**

**(Silvy Pramunesa Bondes, 1920123013, Program Studi Magister
Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2022)**

ABSTRAK

Bermula dari pengajuan *Judicial Riview* oleh Persatuan Jaksa Indonesia sebagai pemohon I, dan pemohon II, III, IV, V yang merupakan jaksa dalam hal ini berkaitan dengan Pasal 66 ayat (1) yang menjadi permohonan pengujian materi kepada Mahkamah Konstitusi. Para Pemohon beranggapan bahwa Pasal 66 ayat (1) dalam hal ini terkait dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris terkait dengan akta yang dibuatnya, ataupun pemanggilan Notaris, telah menghilangkan hak konstitusional dalam proses penegakan hukum. Sebelum perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, juga telah ada Putusan Nomor 49/PUU-X/2014 yang mengabulkan dihapuskannya Pasal 66 ayat (1) mengenai Persetujuan Majelis Pengawas Daerah dalam hal pemanggilan Notaris. Namun, Pasca perubahan Undang-Undang tersebut, kembali memunculkan frasa “dengan persetujuan” akan tetapi menjadi kewenangan Majelis Kehormatan Notaris yang menjadi permasalahan, karena putusan setelahnya di tolak oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga penelitian ini mengangkat masalah: 1) Bagaimanakah pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 mengenai Pasal 66 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris? 2) Bagaimanakah implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 terhadap perlindungan hukum bagi jabatan Notaris? Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah 1) Bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan, amar putusan menyatakan bahwa permohonan Pemohon I, III, IV, V tidak dapat diterima dan menolah Permohonan Pemohon II untuk selain dan selebihnya. 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 tidak memiliki akibat hukum terhadap undang-undang tersebut, namun berimplikasi kepada penegak hukum yang keberatan dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Kata Kunci: Implikasi, Notaris, Mahkamah Konstitusi, Perlindungan Hukum

**IMPLICATIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT'S DECISION
NUMBER 16/PUU-XVIII/2020 ON LEGAL PROTECTION
FOR NOTARY POSITIONS**

*(Silvyia Pramunesa Bondes, 1920123013, Notary Masters Study Program,
Faculty of Law, Andalas University, 2022)*

ABSTRACT

Starting from the Judicial Review submission by the Indonesian Prosecutor's Association as applicant I, and applicant II, III, IV, V who are prosecutors in this case related to Article 66 paragraph (1) which is a request for judicial review to the Constitutional Court. The Petitioners think that Article 66 paragraph (1) in this case is related to the approval of the Notary Honorary Council regarding the deed it has made, or the summons of a Notary, has eliminated constitutional rights in the law enforcement process. Prior to the amendment to Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary, there was also Decision Number 49/PUU-X/2014 which granted the abolition of Article 66 paragraph (1) regarding the Approval of the Regional Supervisory Council in the event that Notary summons. However, after the amendment to the Law, the phrase "with approval" again appeared, but it became the authority of the Notary Honorary Council which became a problem, because the decision afterwards was rejected by the Constitutional Court. So that this research raises the following problems: 1) What are the legal considerations of the Constitutional Court regarding the Constitutional Court Decision Number 16/PUU-XVIII/2020 regarding Article 66 paragraph 1 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Positions? Notary Public? 2) What are the implications of the Constitutional Court Decision Number 16/PUU-XVIII/2020 on legal protection for the position of a Notary? The approach used is a normative legal approach. This study uses primary data and secondary data. Data were analyzed qualitatively. The results of the research obtained are 1) Whereas the considerations of the judges of the Constitutional Court stated that Petitioner I did not have the legal standing to act as an applicant in the application, the verdict stated that the applications of Petitioners I, III, IV, V could not be accepted and rejected Petitioner II's application for other than and the rest. 2) The decision of the Constitutional Court Number 16/PUU-XVIII/2020 has no legal effect on the law, but has implications for law enforcers who object to Article 66 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary.

Keywords: *Implication, Notary, Constitutional Court, Legal Protection*

